

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti bisa membandingkan penelitian terdahulu dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1..	Pengaruh Dimensi Pengungkapan <i>CSR</i> terhadap <i>Future Institutional Ownership</i> (Rizky Eriandani, 2014)	Variabel Independen: Dimensi Pengungkapan <i>CSR</i> Variabel Dependen: <i>Institutional Ownership</i>	Kuantitatif	1. <i>CSR</i> dimensi dimensi produk berpengaruh signifikan pada kepemilikan institusional. 2. <i>CSR</i> dimensi lingkungan, karyawan, dan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional.
2.	Pengaruh Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kepemilikan Institusional (Igmaniar Rakhman, Herry Laksito, 2017)	Variabel Independen: Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Variabel Dependen: Kepemilikan Institusional	Kuantitatif	1. Pengungkapan <i>CSR</i> dimensi hubungan karyawan, masyarakat dan produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepemilikan institusional. 2. Pengungkapan <i>CSR</i> dimensi lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional 3. <i>CSR</i> berpengaruh signifikan terhadap kepemilikan institusional.

3.	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kepemilikan Institusional (Yosua Rinaldy, 2011)	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: Kepemilikan Institusional	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR dimensi produk dan karyawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepemilikan Institusional. 2. CSR dimensi keterlibatan dengan komunitas dan lingkungan tidak berpengaruh signifikan dan tidak positif terhadap Kepemilikan Institusional. 3. CSR dimensi produk, karyawan, komunitas, dan lingkungan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepemilikan Institusional.
4.	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kepemilikan Institusional (Roy Hutapea, Andri Prastiwi, 2013)	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> Variabel Dependen: Kepemilikan Institusional	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. CSR dimensi karyawan dan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepemilikan institusional. 2. CSR dimensi keterlibatan dengan komunita dan lingkungan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepemilikan institusional. 3. CSR berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepemilikan institusional.
5.	<i>The Importance of Corporate Social Responsibility and Financial for the Value of Banking Companies in Indonesia</i> (Dwi Ermayanti Susilo, Grahita Chandrarin, Boge Triatmanto, 2019)	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility, Financial</i> Variabel Dependen: <i>The Value</i>	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Social Responsibility has an influence on value firm banking companies in Indonesia.</i> 2. <i>Financial performance has an influence on value firm of banking companies in Indonesia.</i>
6.	<i>The Impact of Corporate Social Responsibility</i>	Variabel Independen:	Kuantitatif	<i>Therefore has proven a positive and significant relationship between CSRD</i>

<p><i>Disclosure Toward Institutional Ownership of Indonesia Public Listed Companies (Michelle Cynthia Sepriliana, J. Sukmawati Sukamulja, 2013)</i></p>	<p><i>Corporate Social Responsibility</i></p> <p>Variabel Dependen: <i>Institutional Ownership</i></p>	<p><i>and IO. This confirms that increased active involvement and promotion of CSR activities having a positive on IO. Institutional investors respond positively to employee relations and product dimensions</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dicantumkan dalam tabel diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosua Rinaldy (2011), Roy Hutapea, Andri Prastiwi (2013), Michelle Cynthia Sepriliana, J. Sukmawati Sukamulja (2013), Rizky Eriandani (2014), dan Igmaniar Rakhman, Hery Laksito (2017), adalah menggunakan variabel independen *Corporate Social Responsibility* dan variabel dependen *Institutional Ownership*. Dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan *Corporate Social Responsibility Index (CSRDI)* untuk pengukuran *Corporate Social Responsibility* dan untuk pengukuran *Institutional Ownership* menggunakan perbandingan antara jumlah lembar saham kepemilikan institutional dengan total jumlah saham yang beredar. Sedangkan untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada rentang tahun penelitian. Jika pada penelitian terdahulu rentang tahun penelitian berkisar 2010-2017, di penelitian ini rentang tahun yang dipakai dari tahun 2014-2019. Selain itu, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Youa Rinaldy (2011), Roy Hutapea, Andri Prastiwi (2013), Rizky Eriandani (2014), dan Igmaniar Rakhman, Hery Laksito (2017), pengukuran CSR menggunakan

indikator yang dikembangkan *Golden Hope Plantation Berhad* (GHPB) yang hanya memuat 20 item pengungkapan CSR. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada *Global Reporting Initiative* (GRI) G4 untuk dasar penentuan nilai CSR sebagai variabel independen yang memuat 91 item pengungkapan CSR. Penggunaan GRI G4 dikarenakan lebih sesuai dengan praktik CSR yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh CSR terhadap kepemilikan institusional dengan menggunakan indikator GRI G4 sebagai dasar penentuan nilai CSR.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan guna mencapai tujuan agar selaras dengan masyarakat luas. Suatu perusahaan harus lolos uji legitimasi dan revelansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari penghargaan yang diterimanya benar-benar telah mendapat persetujuan dari masyarakat (Chariri & Ghozali, 2007).

Gray *et al* (1996) dalam buku (Hadi, 2011:88) mengemukakan bahwa legitimasi merupakan:

“...a system-oriented view of organization and society... permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organizations, the state, individuals and group.”

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sebagai sistem yang berorientasi kepada keberpihakan masyarakat, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.

O'Donovan (2002) dalam buku (Hadi, 2011:87), berpendapat bahwa legitimasi suatu perusahaan adalah sesuatu hal yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diharapkan oleh perusahaan dari masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi memberikan manfaat dalam mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. O'Donovan (2002) dalam buku (Hadi, 2011:90), mengemukakan bahwa legitimasi dapat diperoleh apabila terdapat kesesuaian antara hasil yang diperoleh perusahaan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dalam arti lain, eksistensi perusahaan tidak mengganggu nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika hal tersebut tidak terjadi kesesuaian, maka legitimasi perusahaan dapat terancam, atau sering dinamakan “*legitimacy gap*” dan hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya.

2.2.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Hummels (1998) dalam buku (Hadi, 2011:94) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah:

“.....(*stakeholder are*) individuals and group who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization's practices, policies and actions.”

Dengan itu dapat dikatakan bahwa *stakeholder* adalah individu atau kelompok baik dari internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan cara perusahaan dalam me-manage *stakeholder* nya.

Tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur pada indikator ekonomi dalam laporan keuangan, kini bergeser lebih jauh lagi dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap *stakeholder*, baik internal maupun eksternal (Harahap, 2002) dalam buku (Hadi, 2011:93).

Solihin (2008) dalam (Mardikanto, 2014) mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam dua (2) kategori, yaitu :

1. *Inside Stakeholder*, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada dalam suatu instansi perusahaan. Termasuk diantaranya : pemegang saham (*stockholders*), manajer, dan karyawan.

2. *Outside Stakeholder*, terdiri dari orang-orang maupun pihak yang bukan pemilik, bukan pula karyawan perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Termasuk diantaranya: pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah.

2.2.3 Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Meskipun *Corporate Social Responsibility* telah menjadi tren yang semakin ramai diperbincangkan, *CSR* masih belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli dan peneliti yang mengemukakan definisi mengenai *CSR* dengan pendapat yang berbeda-beda, meskipun dalam konteks atau makna yang sama.

Johnson and Johnson (2006) dalam buku (Hadi, 2011:46) mendefinisikan *CSR* sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce on averal positive impact on society.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa *Coporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah suatu konsep dan tindakan yang dilakukan perusahaan terkait bagaimana perusahaan dapat mengelola perusahaannya baik sebagian maupun keseluruhan yang menimbulkan dampak positif bagi perusahaan dan lingkungan.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 berasal dari 30

negara di dunia dan beranggotakan 120 perusahaan multinasional, melalui publikasinya "*Making Good Business Sense*" mengemukakan definisi *Corporate Social Responsibility* sebagai berikut:

"Continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large".

Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan guna meningkatkan nilai ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya, serta peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar dan masyarakat lebih luas.

Corporate Social Responsibility sangat erat kaitannya dengan *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan) dimana suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus berdasarkan pada keputusan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi juga harus memikirkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan akibat pengambilan keputusan tersebut. Pada dasarnya CSR merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap *stakeholder* nya (Andriani, 2017).

2.2.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Standar pengungkapan CSR yang banyak digunakan di Indonesia adalah standar yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiatives*. Barometer GRI

dipilih karena memuat pengungkapan kinerja suatu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan *sustainability reporting*. *Global Reporting Initiatives* (GRI) merupakan sebuah jaringan yang sudah berbasis dan telah menjadi pelopor perkembangan dunia, yang menyediakan konsep kerja untuk pelaporan keberlanjutan dan dijadikan referensi bagi seluruh organisasi di semua negara (Hadianto, 2013).

Perusahaan yang sudah melaksanakan CSR, dirasa perlu untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosialnya yang mana tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui Tindakan atau kegiatan CSR yang telah dijalankan oleh perusahaan. Pengungkapan aspek-aspek CSR ini Bersifat sukarela dikarenakan sampai sekarang belum terdapat pertauran baku yang mengaturnya. Didalam penelitian menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan jumlah 91 indikator. Uraianya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

91 Indikator Berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
-Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti
	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
-Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut <i>gender</i> dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan

-Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
-Praktek Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
-Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume
	EN2	Presentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
-Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
-Air	EN7	Konsumsi energi di luar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
-Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
-Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (Cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NO _x , SO _x , dan emisi udara signifikan lainnya
-Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi Basel2 Lampiran I,II,III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan

		presentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status, lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
-Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingkungan produk dan jasa
	EN28	Presentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
-Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
-Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja
-Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
-Asesmen Pemasok Atas Lingkungan	EN32	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negative signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
SUB-KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
-Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan <i>turnover</i> karyawan menurut kelompok umur, <i>gender</i> , dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat Kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut <i>gender</i>
-Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
-Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Presentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan <i>gender</i>

	LA7	Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
-Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut <i>gender</i> , dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola puna bakti
	LA11	Presentase karyawan yang menerima <i>review</i> kinerja dan pengembangan karier secara regular, menurut <i>gender</i> dan kategori karyawan
-Keberagaman dan Kesetaraan Peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut <i>gender</i> , kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
-Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
-Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
-Investasi	HR1	Jumlah total dan presentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk presentase karyawan yang dilatih
-Non-Diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
-Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
-Pekerja Anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

-Pekerja Paksa atau Wajib Kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
-Praktik Pengamanan	HR7	Presentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
-Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
-Asesmen	HR9	Jumlah total dan presentase operasi yang telah melakukan <i>review</i> atau asesmen dampak hak asasi manusia
-Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia	HR10	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB-KATEGORI: MASYARAKAT		
-Masyarakat Lokal	SO1	Presentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
-Anti-Korupsi	SO3	Jumlah total dan presentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
-Kebijakan Publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima atau penerima manfaat
-Anti Persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti-persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
-Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan
-Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Presentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan Tindakan yang diambil
-Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB-KATEGORI: TANGGUNGJAWAB ATAS PRODUK		

-Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Presentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpahaman terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak Kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
-Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta presentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan
-Komunikasi Pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
-Privasi Pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
-Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

(Sumber: www.globalreporting.org)

Pengungkapan CSR sendiri dapat dinilai menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil *content analysis* dengan berdasarkan 91 item indikator GRI-G4. Dalam menghitung CSRDI umumnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu jika item CSR diungkapkan akan diberikan *score* 1, dan jika CSR tidak diungkapkan akan diberikan *score* 0 (Pradipta & Supriyadi, 2015). Selanjutnya *score* dari masing-masing item harus dijumlahkan agar mendapatkan total keseluruhan *score* bagi masing-masing perusahaan.

Rumus perhitungan CSRDI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSRDI}_j = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan :

CSRDI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* Perusahaan

N_j : jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 91

X_{ij} : *dummy variable* : 1 = jika item *i* diungkapkan, 0 = jika item *i* tidak diungkapkan.

Menurut Mardiatina Ningsih, 2012 dalam (Ermayanti, 2016) terdapat beberapa alasan yang mendukung konsep tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), yaitu:

1. Keterlibatan sosial adalah sebuah respon dari apa yang diinginkan dan diharapkan masyarakat terhadap peran perusahaan.
2. Keterlibatan sosial kemungkinan dapat berpengaruh dalam memperbaiki lingkungan masyarakat yang mungkin akan menurunkan biaya produksi.
3. Meningkatkan nama baik perusahaan yang akan menambah perhatian investor, klien maupun karyawan.
4. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Karena campur tangan dari pemerintah dianggap cenderung membatasi peran perusahaan, sehingga untuk menghindari pembatasan tersebut perusahaan menerapkan tanggungjawab sosial.

5. Dapat menunjukkan tanggapan positif perusahaan atas norma-norma yang berlaku di masyarakat.
6. Sesuai dengan keinginan pemegang saham, dalam hal ini publik.
7. Membantu dalam hal kepentingan nasional dan lingkungan seperti peningkatan lapangan kerja, konservasi alam, dan pemeliharaan barang.

Menurut Diego, 2007 dalam (Ermayanti, 2016) mengungkapkan bahwa pengungkapan informasi terkait perilaku suatu perusahaan dan hasil tanggungjawab sosial perusahaan dapat membantu meningkatkan citra positif perusahaan di mata pemangku kepentingan.

2.2.5 Struktur Kepemilikan Saham

Menurut Wardhani dalam (Rinaldy, 2011), bahwa struktur kepemilikan saham merupakan salah satu karakteristik dari perusahaan yang menggambarkan komposisi kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Komposisi kepemilikan saham yang dimaksud terdiri dari jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (*insider*) dan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.

a. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah dalam suatu perusahaan. Kepemilikan pemerintah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah saham yang beredar (Saputra, 2016)

b. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh asing lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan Bahasa sehingga perusahaan melaporkan atau mengungkapkan informasi secara sukarela (Xiao et al dalam Febriana, 2012).

c. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer karena manajer juga ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan seperlunya mengingat kepemilikan dimiliki oleh pihak *insider* yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan tanpa adanya pengungkapan laporan tahunan (Tamba, 2011).

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menurut Tarjo dalam (Rinaldy, 2011), merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga atau instansi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk

perseroan terbatas (PT) dan institusi lainnya yang memiliki kepemilikan 5% atau lebih. Kennon dalam (Rinaldy, 2011) menyatakan bahwa investor institusional adalah sebuah entitas, perusahaan, reksa dan, atau kelompok sejenis lainnya yang memiliki dana dalam jumlah yang besar untuk berinvestasi. Menurut McClure dalam (Rinaldy, 2011) investor institusional berjuang keras untuk mendapatkan saham yang memiliki prospek bagus yang mana dalam prosesnya investor institusional akan memberdayakan analis, peneliti dan spesialis lain untuk mendapatkan informasi terbaik mengenai perusahaan yang akan diinvestasi. Bahkan, investor institusional terkadang bertemu secara langsung dengan direktur perusahaan secara rutin guna mengevaluasi perusahaan dan melakukan penelitian mengenai operasi perusahaan serta prospeknya. Oleh karena itu, kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Permanasari, 2010).

Menurut Jensen dan Meckling dalam (Permanasari, 2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor secara efektif setiap keputusan dan Tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan yang strategis. Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mempunyai keuntungan bagi perusahaan (Permanasari, 2010). Pertama, dengan adanya kepemilikan institusional, perusahaan mempunyai profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi. Kedua, dengan adanya investor institusional, perusahaan memiliki motivasi yang

kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional tentu akan mendorong peningkatan *controlling* yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Menurut McClure dalam (Rinaldy, 2011) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih dalam menilai pasar dan prospek, sehingga banyak investor lain yang cenderung akan mengikuti keputusan investasi investor institusional dan hal ini akan berdampak besar terhadap nilai saham perusahaan. Misalnya, jika investor institusional membeli saham kepemilikan suatu perusahaan dalam jumlah yang besar maka kemungkinan besar akan meningkatkan permintaan pembelian saham perusahaan tersebut. Hal ini akan berdampak lebih lanjut pada naiknya harga saham perusahaan dikarenakan banyaknya permintaan.

Menurut Bushan (2010) dalam (Rinaldy, 2011), investor institusional lebih mengenal pasar jauh lebih baik daripada investor individu, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan yang menjadi investor institusi besar selalu memiliki banyak analis, peneliti, dan spesialis dalam menilai prospek pasar demi instansi dana mereka yang biasanya mencapai jumlah milyaran dolar.
- 2) Investor institusi selalu membeli saham yang telah diteliti secara seksama telah memiliki prospek yang baik.

3) Manajer portofolio institusional cenderung menemui pimpinan perusahaan yang diinvestasi secara rutin dan melakukan penelitian secara detail dan secara kontinyu terhadap perusahaan.

Selain itu, investor institusional memiliki dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investor individu. Dana yang besar dari investor institusional dan kredibilitas yang didapatkan dari investor institusional sering menjadi incaran perusahaan-perusahaan. Oleh karena itulah, menurut Saleh *et al* (2010), perusahaan berusahaan melakukan pengungkapan CSR agar mampu terlihat memiliki prospek ke depan yang baik sehingga terlihat menarik bagi investor institusional. Pengukuran kepemilikan institusional dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki institusional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Berdasarkan uraian diatas, struktur kepemilikan saham yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. McClure dalam (Rinaldy, 2011) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih baik dalam hal menilai pasar dan prospek dibandingkan investor individu. Hal tersebut bisa menambah kredibilitas perusahaan karena perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tinggi mencerminkan tingginya prospek perusahaan itu juga yang nantinya bisa menambah kredibilitas perusahaan di mata investor lainnya. Sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk menarik para investor institusional, salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan

CSR. Praktik dan pengungkapan CSR akan membangun *image* yang positif di mata investor sehingga dianggap mampu menarik dan meningkatkan kepemilikan institusional perusahaan. Hal inilah yang akan dibahas di dalam penelitian ini.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh CSR Terhadap *Institutional Ownership*

Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) dalam perusahaan berfungsi sebagai pihak yang melakukan *monitoring* terhadap manajer. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan tertentu maka semakin besar pula kewenangan mereka dalam melakukan *monitoring* manajer (Jensen & Meckling dalam Andriani, 2017). Investor institusional cenderung melihat kemungkinan kinerja jangka panjang perusahaan melalui aktivitas CSR. Hal ini karena investor institusi membutuhkan pengungkapan CSR sebagai informasi untuk keputusan investasi mereka. Sesuai dengan teori legitimasi dan teori *stakeholder* dimana perusahaan berharap dengan melakukan kegiatan CSR dapat memperoleh legitimasi serta dapat meningkatkan eksistensinya di mata masyarakat serta di hadapan *stakeholder*. (Rakhman & Laksito, 2017) mengemukakan bahwa suatu instansi melakukan kegiatan investasi biasanya didasari motif mencari laba, namun investor institusi juga sangat memperhatikan keberlangsungan usaha perusahaan, hal ini didasari karena investor institusi cenderung berinvestasi dalam jangka panjang.

Menurut (Andriani, 2017) para investor mulai memperhatikan CSR dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Perusahaan yang melakukan CSR memiliki peluang untuk keberlanjutan dan keberlangsungan usaha. Salah satu cara perusahaan dalam menjaga dan mendorong keberlangsungan usaha adalah dengan menerapkan praktik *Corporate Social Responsibility*. Praktik CSR pada dasarnya adalah bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat sekaligus sebagai saran untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam bersaing.

Konsep CSR secara otomatis akan menuntut perusahaan agar lebih peduli terhadap kepentingan *stakeholder*-nya, *stakeholder* bukan hanya investor saja namun juga kepentingan para karyawan, masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Hal inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan investor institusi dalam pengambilan keputusan berinvestasi, semakin *legitimate* suatu perusahaan maka reputasi dan citra perusahaan akan baik pula. Perusahaan yang memiliki citra yang baik dinilai memiliki risiko investasi yang lebih rendah dan hal tersebut akan menarik minat investor institusi dimana investor institusi berinvestasi dalam jangka panjang (Rakhman & Laksito, 2017).

Menurut McClure dalam (Rinaldy, 2011) menyatakan bahwa investor institusional memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih baik dalam hal menilai pasar dan prospek dibandingkan investor individu. Sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk menarik para investor institusional, salah satunya dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR. Praktik dan pengungkapan CSR akan

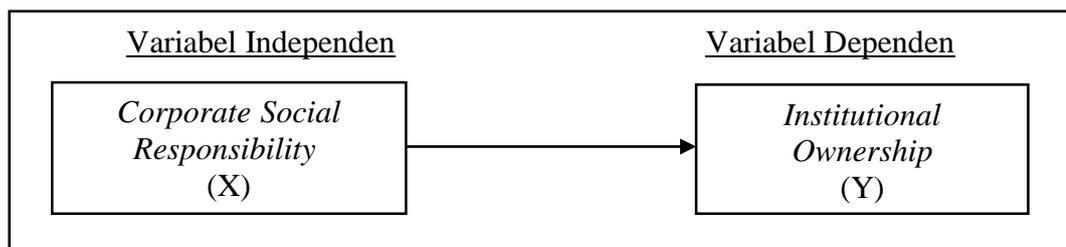
membangun *image* yang positif di mata investor sehingga dianggap mampu menarik dan meningkatkan kepemilikan institusional perusahaan.

(Hutapea & Prastiwi, 2013) mengemukakan bahwa melalui laporan tahunan, perusahaan akan menggambarkan kesan tanggungjawab sosialnya sehingga akan menjadi daya tarik perusahaan untuk menarik investor institusional. Investor institusional merupakan bagian dari *stakeholder* perusahaan yang lebih cenderung memilih investasi pada perusahaan yang banyak melakukan praktik CSR serta cenderung menghindari berinvestasi pada perusahaan dengan kinerja sosial yang buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Igmaniar Rakhman, Herry Laksito (2017), Roy Hutapea, Andri Prastiwi (2013), dan Michelle Cynthia Sepriliana, J. Sukmawati Sukamulja (2013) menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel *Corporate Social Responsibility* terhadap *Institutional Ownership*. Hal ini menunjukkan teori *stakeholder* yang menunjukkan perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi hanya untuk dirinya melainkan juga untuk memberikan manfaat untuk para *stakeholder*-nya, serta sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha melakukan praktik CSR dan menimbulkan citra dan *image* yang baik sehingga menarik perhatian investor khususnya investor institusional agar berinvestasi di perusahaan. Besarnya luas pengungkapan CSR perusahaan akan menjadi suatu pertimbangan tersendiri bagi investor institusi untuk menanamkan modalnya.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan agar dapat lebih memahami konsep penelitian yaitu pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Institutional Ownership*. Kerangka konsep pada penelitian ini merupakan hubungan antar variabel, dimana variabel dependen (*Institutional Ownership*) dipengaruhi oleh beberapa aspek dari variabel independen (CSR) yang telah dijelaskan pada tinjauan teori dan penelitian terdahulu diatas. Sehingga kerangka konseptual dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas serta penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Institutional Ownership*